



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu** Tanggal : **09** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Indo Pos	2. Jawa Pos	3. Kompas	4. Koran Sindo	5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau	7. Media Indonesia	8. NonStop	9. Pos Kota	10. Pelita	11. Rakyat Merdeka	12. Republika	13. Suara Karya	14. Sentana	15. Warta Kota	16. Harian Terbit	17. Sinar Harapan	18.

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



foto: deny

Wakil Walikota Arifin, dan Kasudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mulyadi, serta siswa SDN 12 Benhil, saat panen sayuran dan lele.

Panen Lele dan Sayuran di SDN 12 Benhil

TANAH ABANG (Pos Kota) - Pelajar SD Negeri 12 Bendungan Hilir (Benhil), panen lele dan sayuran di lahan kosong di sekolah, Jumat (8/5). Hasil penanaman dan pembudidayaan tersebut, dipasarkan dan sebagian di konsumsi sendiri. Wakil Walikota Jakarta Pusat, Arifin, didampingi Kasudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mulyadi, mengatakan upaya penanaman sayuran dan pembudidayaan lele di sekolah meru-

pakan langkah positif untuk edukasi sejak dini.

"Ini konsep pertanian dalam kota, di mana keberadaan lahan sudah tidak menjadi permasalahan asalkan ada keinginan. Diharapkan ini dapat menjadi motivasi sekolah lain, khusus di wilayah Jakarta Pusat," ucap Arifin yang ikut memanen.

SUMBANGAN BRI Kepala SD Negeri 12 Benhil, Jakarta Pusat, H.Hidayat, mengatakan

awal penanaman sayuran dan pembudidayaan lele yang dilakukan sekolah merupakan sumbangan dari BRI melalui program CSR (corporate sosial responsibility). "Selanjutnya kita yang melakukan perawatan dan pengembangbiakan sendiri," jelasnya.

Pihak sekolah membentuk kelompok siswa. "Tentu mereka sudah diberikan pelatihan dan pembinaan dari Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan," paparnya (deny/ak)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu**

Tanggal : **09**

Bulan : **MEI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, **25**, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

4 Juru Parkir di Jalan Sabang Dipecat

EMPAT petugas parkir atau juru parkir yang ditempatkan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, dipecat PT Mata Biru karena menerima pembayaran tunai dari pengendara pengguna lahan parkir. Selain itu, perusahaan pengelola lahan parkir itu menjatuhkan sanksi pembatasan jam kerja kepada enam petugas lainnya.

Direktur PT Mata Biru Wahyu Ramadhan mengatakan keempat petugas dipecat karena dua kali ketahuan menerima pembayaran menggunakan uang tunai. Padahal, sistem parkir di Jalan Sabang telah menggunakan *parking meter* dan sejak 29 Januari pembayarannya memakai

uang elektronik atau *e-money* guna mengatasi kebocoran.

"Sepuluh orang terkena sanksi, tapi empat di antara mereka dipecat karena dua kali melakukan kesalahan serupa. Enam orang lagi kami beri tugas hanya Sabtu dan Minggu," tegasnya, beberapa waktu lalu.

Petugas yang terkena sanksi berjaga dua hari seminggu itu hanya mendapat upah Rp75 ribu per hari. Selain itu, mereka dievaluasi selama sebulan terakhir.

Hasil evaluasi terhadap enam petugas, ujar Wahyu, akan diumumkan dalam waktu dekat. Dari hasil evaluasi, di antara keenam juru parkir

itu juga bakal ada yang dipecat karena dalam masa evaluasi ternyata tetap melanggar, yaitu mengutip biaya parkir secara tunai.

Tarif parkir yang berlaku di Jalan Sabang ditetapkan Rp5.000 per jam untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Ia juga menyebutkan sebagian besar pengendara yang parkir di Jalan Sabang dan tidak mengambil tiket *parking meter* ialah pengendara sepeda motor.

Salah seorang petugas parkir yang pernah menerima pembayaran secara tunai beralasan ia terpaksa menerima tunai lantaran pengendara saat datang tidak mengambil karcis.

"Nanti (uang parkir) ini juga akan saya setorkan ke pengelola dan membuat laporan. Masak kalau enggak ada tiket kita *biarin* lewat (gratis)," ujar petugas parkir yang enggan disebutkan namanya.

Ia menyadari menerima pembayaran tunai ialah pelanggaran. Apalagi, petugas telah menerima gaji bulanan dari PT Mata Biru meski jumlahnya dinilai masih jauh dari cukup.

Petugas parkir lainnya, Suwardi, mengatakan, saat mulai direkrut ia bersama teman-temannya dijanjikan gaji Rp4,8 juta. Namun, sampai saat ini ia masih menerima gaji Rp2,5 juta per bulan. (DA/J-2)



TURUN DRASTIS: Suasana lahan parkir meter di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pekan lalu. Jumlah kendaraan yang parkir menurun drastis sejak penerapan *parking meter* dengan tarif parkir Rp5.000 per jam bagi mobil dan Rp2.000 per jam untuk motor.



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu** Tanggal : **09** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
Halaman	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

Panti Pijat dan Tempat Hiburan Disidak 'Pintu Jangan Tutupi Kaki'

GAMBIR (Pos Kota) – Sejumlah pengelola panti pijat di Jakarta Pusat tidak memenuhi peraturan karena menggunakan pintu tertutup penuh. Ini terungkap dalam inspeksi mendadak terhadap industri tempat hiburan dan panti pijat, Jumat (8/5).

"Seharusnya pintu disisakan tidak sampai menutupi kaki," terang Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat, Ahmad Surya.

Menurut Ahmad Surya, inspeksi mendadak tersebut dilakukan di delapan kecataman wilayah Jakpus, sesuai intruksi Gubernur DKI, Basuki T.Purnama. "Memang untuk pengawasan tahun ini diberikan kepada tingkat kota. Inspeksi ini meliputi izin usaha dan penyalahgunaan."

BARU 300

Dari 1.200 tempat hiburan dan panti pijat di Jakpus, baru sekitar 300 yang terdata dan pembinaan. "Kita berharap dalam sepekan, semua terdata dengan harapan para pengelola mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah," tegasnya.

Sejumlah pemilik tempat hiburan seperti cafe dan panti pijat yang telah terdata mengaku telah tertib dengan rutin melakukan pengurusan izin. "Kami tidak kaget bila ada razia seperti ini," terang Sri, manager tempat pijat di kawasan Gambir. (deny/ak)



Hari : **Sabtu** Tanggal : **09** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, **25**, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Masih Ada Pengguna Beri Uang Tunai

Parking meter diberlakukan di dua lokasi dengan uang elektronik untuk mengatasi kebocoran retribusi. Namun, masih ada petugas menerima pembayaran tunai.

DENI ARYANTO

HAMPIR delapan bulan sejumlah juru parkir di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, diberdayakan untuk berpartisipasi mengelola lahan parkir dengan sistem meter. Namun sayang, meski sudah mendapat gaji bulanan, di antara mereka masih ada yang menerima pembayaran dengan menggunakan uang tunai dari pemilik kendaraan.

Padahal, 11 unit alat *parking meter* yang dipasang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama perusahaan pengelola untuk mengatasi kebocoran retribusi parkir yang terjadi selama ini akibat pembayaran secara tunai. Bahkan, sejak 29 Januari pembayaran retribusi parkir menggunakan uang elektronik atau *e-money*.

Berdasarkan pantauan beberapa waktu lalu di salah satu titik parkir, seorang petugas parkir terlihat kewalahan mengatur keluar-masuk kendaraan yang parkir kendati lahan parkir di bawah tanggung jawabnya tidak seluruhnya terisi. Kerepotannya ditambah pemilik kendaraan yang belum mampu mengoperasikan mesin

parking meter atau terminal parkir elektronik (TPE) secara mandiri.

Akibatnya, petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk melayani pengendara yang parkir karena harus mengambil setruk parkir di alat *parking meter*. Tak ayal, kondisi demikian memicu sebagian kendaraan bebas parkir di sekitar area *parking meter* tanpa mengantongi selebar karcis yang wajib dibayar sebelumnya.

Kondisi demikian terutama terjadi pada kendaraan roda dua. Mirisnya, transaksinya kembali beralih ke pola lama, yakni pemilik kendaraan membayar dengan uang tunai. Sejumlah pengendara terlihat masih memberikan uang kepada juru parkir saat hendak meninggalkan lokasi parkir. Tanpa canggung, petugas bersangkutan menerima pembayaran itu dan memasukkannya ke saku.

Kartu petugas

Erik, salah seorang pengendara sepeda motor yang membayar parkir secara tunai, beralasan baru kali ini melakukan itu lantaran kasihan terhadap petugas yang gajinya dinilai kecil. "Kebetulan saja saya

kenal sama tukang parkirnya, jadi saya bayar ke dia. Kasihan, soalnya gajinya enggak seberapa. Lagi pula saya jarang bayar tunai," kilahnya.

Seperti dikatakan salah seorang petugas parkir di Jalan Sabang, gaji yang diterimanya setiap bulan dari PT Mata Biru selaku pengelola lahan parkir di lokasi itu sebesar Rp2,5 juta.

Masih adanya pengguna lahan parkir yang enggan menggunakan mesin *parking meter* meski memiliki uang elektronik sekalipun juga terjadi di lokasi sistem *parking meter* sepanjang Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Ada yang bandel juga, enggak mau (bayar menggunakan *e-money*). Alasannya ribet. Padahal punya kartu (*e-money*) dan (prosesnya) cuma sebentar," keluh Ade, salah seorang petugas parkir di jalan itu.

Untuk menghindari *ngotot* dengan pengguna yang bandel, ia terpaksa mengkalinya. Setelah pengguna membayar tunai, ia lalu masukkan kartu *e-money* miliknya ke mesin *parking meter*. Petugas itu mengaku terpaksa menggunakan kartu *e-money* miliknya untuk mengatasi pengendara yang tidak mau mematuhi aturan pembayaran.

"Kalau pengendara bayar tunai, misalnya Rp5.000, saya bayar ke mesin pakai kartu saya supaya dipotong dari saldo saya. Uang tunainya terpaksa saya simpan, kan seharusnya tidak boleh," ujarnya. (Ths/J-2)

deni_aryanto
 @mediaindonesia.com

Diteruskan / Kepada



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari :	Sabtu	Tanggal :	09	Bulan :	MEI	Tahun :	2015
MEDIA :	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.			
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,				Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,		

Kinerja Sudin Tata Air Jakpus Dicitir

NONSTOP, CIBIR-Sudin Tata Air Jakarta Pusat blunder. Proyek saluran air yang mangkrak di di depan komplek Perumahan Patra II Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dianggap sebagai bukti kinerja mereka tak becus.

Pengamat Perkotaan Amir Hamzah mengatakan, terbengkalainya proyek pembangunan saluran air tersebut adalah karena lemahnya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini, hingga berimbas kepada kinerja bawahan.

"Jadi terbengkalainya proyek tersebut memang karena tidak ada uang dalam membangun, dan kedepan gubernur lebih baik lagi, jangan hanya bicara saja yang besar," terang Amir, kemarin.

Dia mencatat, dari 200 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru 100 orang yang menyerahkan daftar

isi pelaksanaan anggaran (Dipa), jadi kalau dilihat dari ini maka masih membutuhkan proses, dan bulan Juli akan terealisasi pembangunan di Jakarta.

"Seharusnya ini menjadi pembelajaran berharga bagi Ahok, dan bukti lemahnya kepemimpinan yang dilakukan selama ini," ujarnya.

Amir mengakui, imbas dari konflik antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD akhirnya berdampak pada pembangunan sampai tingkat terendah.

"Mungkin bukan hanya saluran air saja, tapi banyak pembangunan lainnya, baik sarana jalan, dan taman yang terbengkalai karena memang dana talangan tidak ada," ujar Amir.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi Kasudin PU Tata Air Jakarta Pusat Herning enggan berkomentar atas mangkraknya proyek saluran air tersebut. (RAM)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu** Tanggal : **09** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
Halaman	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

3 Pasar di Jakpus Masuk Program Pembangunan Pasar Rakyat



Pasar tradisional di Jakarta Pusat.

NONSTOP, HANGGAR- Humas Perusahaan Daerah Pasar Jaya, Agus Laman mengatakan, Pasar Petojo Enclék, Pasar Gang Kancil, dan Pasar Sumur Batu masuk dalam pembangunan program pasar rakyat.

Dia mengemukakan, ada 10 Pasar di wilayah Jakarta yang masuk dalam program pembangunan pasar rakyat. "Pasar rakyat adalah pasar penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 10 miliar," kata Agus, kepada Nonstop, kemarin.

Menurutnya, pasar rakyat konsepnya dengan menggunakan hanggar, dan dua lan-

tai. "Pasar ini tidak diberikan fasilitas AC dan terbuka," tambahnya.

Dia menuturkan, dalam konsep pasar rakyat, harga sewa gratis kepada pedagang, namun hanya membayar pengelolaan pasar saja.

Dia mengungkapkan, selain Pasar Petojo Enclék, Pasar Gang Kancil dan Pasar Sumur Batu. PD Pasar Jaya juga membangun pasar rakyat lainnya, yakni Pasar Sinar dan Pasar Pelita (Jakarta Utara), Pasar Cawang Kapling dan Pasar Bidara Cina (Jakarta Timur), Pasar Karet Belakang (Jakarta Selatan). (RAM)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu** Tanggal : **09** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos ② Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
--------------	--	---	---	---

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ③0, **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



Minta Warga Jangan Manja

SAWAH BESAR - Retno Daru Dewi menjadikan keluhan warganya dalam aplikasi *smart city* sebagai rujukan kegiatan sehari-hari. Karena itu, lurah Gunung Sahari Utara tersebut menugasi secara khusus seorang pegawainya untuk memantau aplikasi *Qlue*. Jadi, keluhan warga bisa cepat direspons.

Itulah yang membuat Gunung Sahari Utara mengalami grafik peningkatan dalam *ranking* kelurahan *smart city*. Jika pekan lalu masih berada di urutan

bawah dari *top ten*, kelurahan di Jakarta Pusat tersebut menapak lima besar dalam pekan ini. "Minimal setiap jam harus dipelototin. Saya juga selalu *sempetin* buka," ujar Retno kepada koran ini kemarin (8/5).

Dia menjelaskan, turun langsung ke lapangan saat ada keluhan sangat penting. Tidak hanya mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, Retno juga bisa dekat dengan warganya.

Apalagi, beberapa keluhan warga biasanya tidak masuk dalam program yang direncanakan musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan). Biasanya keluhan masyarakat muncul tiba-tiba karena persoalan di lapangan juga terjadi tiba-tiba. "Tapi, bukan berarti tak bisa ditangani karena *kan nggak* harus menunggu anggaran digedok atau dicairkan," jelasnya.

Kemarin, misalnya. Di antara 20 keluhan yang masuk, 18 keluhan sudah dituntaskan Retno dan stafnya. Sementara satu keluhan lainnya, yakni kebersihan, masih ditangani.

Retno mengungkapkan, ada salah satu keluhan yang lucu. Yaitu, cermin pemantau lalu lintas di salah satu jalan kelurahan yang buram.

"Kayak cermin buram, *kan* warga sebenarnya bisa membersihkan sendiri. Jadi, ini (*Qlue*) jangan membuat warga manja. Meski begitu, kami sudah bersihkan kok," kata dia.

Berbeda halnya dengan keluhan yang membutuhkan tenaga ekstra dan biaya tersendiri. "Kalau warga bisa mengerjakan sendiri, ya dikerjakan dong," tegas Retno. (bad/c14/dns)

Intruksi / Informas

ruskan / Kepada



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu** Tanggal : **09** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Akhirnya Penyerahan DPA SKPD 100 Persen

NONSTOP, DPA-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budiharsono mengatakan sampai siang kemarin, SKPD/UKPD DKI yang belum menyerahkan DPA hanya mencapai 10 persen saja. Dia yakin pada batas waktu penyerahan DPS di hari ini, penyerahan DPA bisa mencapai 100 persen.

"Hari ini kan batas akhir penyerahan DPA. Jadi semuanya langsung mengebut pengisian DPA dan menyerahkan ke BPKAD DKI. Pada takut semua kayaknya, takut anggaran *enggak* cair. Tapi saya optimistis lah, 100 persen dapat tercapai hari ini," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (8/5).

Salah satu SKPD yang belum menyerahkan DPA adalah Dinas Tata Air. Dinas

ini meminta perpanjangan waktu karena harus melakukan penyesuaian anggaran. Awalnya, Dinas Tata Air meminta penyerahan DPA dapat diserahkan Senin (10/5), tetapi tampaknya hari ini sudah bisa diserahkan.

"Kemarin, Dinas Tata Air minta agak sedikit terlambat, karena ada yang harus disesuaikan. Mereka minta Senin, tapi kayaknya *enggak* sampai *deh*. Kemarin sudah ada Sudin Tata Air yang menyerahkan. Kayaknya hari ini semuanya menyerahkan DPA. Kemarin saja *full* banget yang menyerahkan DPA," ujarnya.

Setelah menerima DPA dari seluruh SKPD dan UKPD DKI Jakarta, Heru mengungkapkan pihaknya langsung memproses pembuatan SPD terhadap DPA tersebut. Memang syarat pencairan dana

dalam APBD DKI 2015 salah satunya adalah harus ada DPA.

"Sekarang kami sudah sambil jalan kok. Bagi SKPD dan UKPD yang telah mengirimkan DPA, langsung kami buat SPD untuk mencairkan anggarannya. Kemarin sebagian SPD sudah saya teken, sudah keluar uangnya, pokoknya sambil jalan. Seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan minta dipercepat, ya sudah saya dulukan. Masuk ke rekening dinas masing-masing," jelasnya.

Hingga saat ini, ungkap calon kuat Sekda DKI ini, SPD yang sudah dikeluarkan untuk anggaran Triwulan I/2015 sudah sekitar 60 persen. Namun dia memastikan pada akhir Mei, seluruh anggaran SKPD dan UKPD dapat dicairkan. (BCR)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Sabtu** Tanggal : **09** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, **5**, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



SIDAK PANTI PIJAT

Petugas Sudin Pariwisata dan Kebudayaan melakukan sidak terhadap sejumlah tempat pijat di wilayah Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015). operasi tersebut dilakukan sebagai upaya pendataan sekaligus pembinaan. Dari data yang dihimpun, sebanyak 1200 tempat hiburan yang terdiri dari karaoke, panti pijat, klub, restoran dan spa di wilayah Jakarta pusat, hanya 300 tempat hiburan yang terdata.

TOELOES/HANTER